

**INOVASI KEGIATAN PEMUTAKHIRAN BASIS DATA TERPADU
(PBDT) 2015 MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENETAPAN SASARAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL DAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
(Studi di Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

WIDJI RAMADANI



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

INOVASI KEGIATAN PEMUTAKHIRAN BASIS DATA TERPADU (PBDT) 2015 MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENETAPAN SASARAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi di Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung)

Oleh

WIDJI RAMADANI

Inovasi pada kegiatan PBDT 2015 dalam wujud partisipasi masyarakat dilakukan karena dalam kegiatan sebelumnya masih banyak terjadi kesalahan pada data yang didapat sehingga dilakukan inovasi dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatannya. Kegiatan ini berdasarkan Inpres No. 7 tahun 2014 tentang pelaksanaan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan inovasi yang dilakukan BPS dalam wujud partisipasi masyarakat dan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat pada pelaksanaannya serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat pada kegiatan tersebut. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini masyarakat berperan aktif dan berjalan dengan baik dan sesuai aturan. Tetapi masih ditemukan kendala pada pelaksanaannya, hal tersebut dikarenakan pada petugas pencacah di lapangan yang dalam pengerjaannya kurang teliti sehingga menimbulkan masalah pada proses pengolahan data. Terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu faktor internal yang terdiri dari pendidikan, usia dan pekerjaan. dan faktor eksternal yang terdiri dari fasilitas dan kepemimpinan pemerintah. Faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan PBDT 2015.

Rekomendasi yang peneliti berikan, yaitu menguatkan partisipasi masyarakat pada pengambilan keputusan, inovasi harus lebih ditingkatkan melalui aplikasi program

yang ada, pelatihan petugas lapangan dilakukan lebih lama, pengawasan dilakukan secara merata dan berkala.

Kata kunci: Reformasi administrasi, reformasi birokrasi, inovasi, partisipasi masyarakat, kemiskinan

ABSTRACT

THE INNOVATION OF UPDATING THE UNIFIED DATABASE 2015 ACTIVITIES THROUGH COMMUNITY PARTICIPATION IN DETERMINING THE TARGET OF SOCIAL PROTECTING AND PROVERTY REDUCTION PROGRAM

(Study case at Badan Pusat Statitik Kota Bandar Lampung)

By

WIDJI RAMADANI

The innovation on the activity of PBDT 2015 in community participation was done because there were many mistakes on the previous activities in the obtaining data, so innovation should be done by the presence of community participation in the activities implementation. This activity was based on Impres No. 7 year 2014 on the implementation of the social protection programs and poverty reduction.

The purpose of this research is to describe the innovation that had been done by BPS in a community participation and the forms of community participation on the implementation of activity also the factors that affecting community participation on those activity. The methods that used on this research is a qualitative approach. The data collection techniques that used for this research are interview, observation and documentation.

Based on its case, it indicates that community participation on those activity has an active role and works well by the rules. But, the obstacle still can be found on the implementation, because the enumerators, who work in the field, were inaccurate in their work so that causing some problems on the data processing. There are some factors that can be affecting community participation, which are internal factors that consisting of education, age and occupation. And external factors that consisting of facilities and government leadership. Those factors are affecting the success of activity of PBDT 2015.

The recommendations that given by the researcher are community participation in decision-making should be strengthened, innovation should be increased through

program application, training for field officers should be held longer, the surveillance should be conducted evenly.

Key words: Administrative reform, bureaucratic reform, innovation, community participation, poverty

**INOVASI KEGIATAN PEMUTAKHIRAN BASIS DATA TERPADU
(PBDT) 2015 MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENETAPAN SASARAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL DAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
(Studi di Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung)**

Oleh

WIDJI RAMADANI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi : **INOVASI KEGIATAN PEMUTAKHIRAN BASIS DATA TERPADU (PBDT) 2015 MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENETAPAN SASARAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi di Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Widji Ramadani**

No. Pokok Mahasiswa : 1216041105

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara


Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si.
NIP 19710122 199512 2 001


Devi Yulianti, S.A.N., M.A.
NIP 19850705 200812 2 004

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.
NIP 19750720 200312 1 002

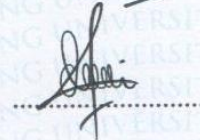
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si.



Sekretaris : Devi Yulianti, S.A.N., M.A.



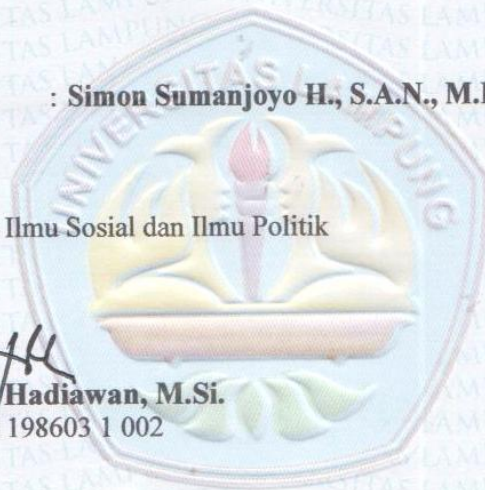
Penguji Utama : Simon Sumanjoyo H., S.A.N., M.PA.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Hi Agus Hadiawan, M.Si.
NIP. 19580109 198603 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Juni 2016

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandar Lampung, 27 Juni 2016

membuat pernyataan,



Widji Ramadani

NPM. 1216041023

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Widji Ramadani, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 01 Maret 1994. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Misbahudin, S.Pd dan Ibu Sariyati. Memulai jenjang pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) Dwi Tunggal Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2000. Selanjutnya pada tahun 2006 menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Penengahan Bandar Lampung. Pendidikan selanjutnya yaitu Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 22 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2009. Kemudian penulis menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 12 Bandar Lampung diselesaikan tahun 2012.

Pada tahun 2012 penulis terdaftar sebagai mahasiswi pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung penulis diterima melalui jalur SNMPTN dan tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA). Pada tahun 2015 di pertengahan bulan Januari, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Marga Mulya, Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus selama 40 hari.

MOTTO

Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya: “Jadilah”, lalu jadilah dia.”

(QS.Ali Imran: 47)

“Innovation comes from saying “no” to 1000 things.”

(Steve Jobs)

“If you look at what you have in life, you’ll always have more. If you look at what you don’t have in life, you’ll never have enough.”

(Oprah Winfrey)

“No matter the storm, when you are with God, there is always a rainbow waiting.”

(Widji Ramadhani)

“Do what you like, like what you do”

(Widji Ramadhani)

P E R S E M B A H A N

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucap rasa syukur kepada
ALLAH SWT Kupersembahkan karya
sederhanaku ini untuk:

Bapak dan Ibu Tercinta

Yang telah memberikan semangat dan
dukungan

Terima kasih atas keikhlasan dan
ketulusan serta doa yang tak henti-
hentinya selalu kalian berikan

Mamas dan adikku

Yang selalu memberikan
keceriaan selama ini dalam
hidupku

Para Pendidik dan Almamater Universitas Lampung

Yang selalu memberikan bekal
ilmu dan pesan moral untuk
melangkah lebih jauh lebih baik
ke depan

SANWACANA

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin tercurah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tak lupa shalawat serta salam penulis ucapkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sang motivator bagi penulis untuk selalu ikhlas dan bertanggung jawab dalam melakukan segala hal. Atas segala kehendak dan kuasa Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Inovasi Kegiatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 Melalui Partisipasi Masyarakat dalam Penetapan Sasaran Program Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Studi di Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung)**", sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (SAN) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si., selaku dosen pembimbing utama penulis. Terimakasih untuk ilmu, saran, waktu, nasehat dan bimbingannya yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga Penulis menjadi lebih giat untuk lebih cepat menyelesaikan skripsi ini. Satu hal yang selalu disampaikan agar selalu berusaha dan jangan cepat menyerah.
2. Ibu Devi Yulianti, S.A.N, M.A , selaku dosen pembimbing kedua bagi penulis. Terimakasih atas kesetiaan dan kesabarannya dalam membimbing penulis selama proses bimbingan skripsi ini. Penulis memohon maaf apabila selama dalam pengerjaan skripsi ini penulis melakukan kesalahan dan kelalaian terhadap ibu.
3. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N.,M.P.A, selaku dosen pembahas dan penguji bagi Penulis. Terimakasih atas saran, ilmu, dan motivasi yang bermanfaat bagi Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Terimakasih untuk motivasi dan saran yang telah diberikan.
6. Ibu Dewie Brima Atika,S.IP.,M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis. Terimakasih untuk saran, nasihat, motivasi dan ilmu yang bermanfaat yang telah diberikan kepada Penulis untuk memotivasi penulis untuk menjadi lebih baik mencapai kesuksesan.
7. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara FISIP UNILA (Bapak Prof. Dr Yulianto, M.S, Bapak Dr. Bambang Utoyo,M.Si, Bapak Dr. Noverman Duadji, M.Si, Ibu Dr Novita Tresiana, S.Sos.,M.Si, Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP, Bapak Syamsul Ma'arif, SIP.,M.Si, Bapak Nana Mulyana,S.IP.,M.Si, Ibu Ani Agus

Puspawati, S.AP.,M.AP, Bapak Fery Triatmojo, S.AN., M.AP, Ibu Dra. Dian Kagungan, M.H, Ibu Suasana Indriyati, S.IP.,M.Si, Ibu Meliyana, S.Ip.,M.A, Ibu Selvi Diana, Ibu Intan Fitri Meutia, S.AN.,M.A, dan Pak Izul). Terimakasih atas segala ilmu yang telah penulis peroleh di kampus semoga dapat menjadi bekal yang berharga dalam kehidupan penulis ke depannya.

8. Ibu Nur selaku staf jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selalu memberikan pelayanan bagi penulis yang berkaitan dengan administrasi dalam penyusunan skripsi ini.
9. Segenap informan penelitian: pihak BPS Kota Bandar Lampung serta masyarakat yang ikut berpartisipasi pada kegiatan ini penulis mengucapkan terimakasih banyak atas izin, informasi, serta kerjasamanya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Teristimewa dan Tersayang Bapak dan Ibu. Untuk Bapak yang menjadi penyemangat, motivator, dan inspirasi untuk segera menyelesaikan pendidikan S1. Untuk Ibu, terimakasih banyak atas kasih sayang, perhatian, dukungan dan doa yang selalu diberikan setiap hari dan setiap waktu, nasihat, pengorbanan baik dari segi moril maupun materil sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Terimakasih banyak bapak dan ibu adalah penyemangat untuk aku mencapai kesuksesan. Semoga Allah SWT memberikan balasan dan kebahagiaan yang indah untuk Bapak dan Ibu di dunia dan di akhirat kelak, Amin ☺
11. Saudara kandungku, Panji Bayu Raharjo, S.E dan Nur Indah Saputri. Terimakasih atas segala bantuan, semangat, do'a, dan dukungan yang sangat besar kepada Penulis. Semoga kelak kita bertiga dapat menjadi kebanggaan Bapak dan Ibu serta mengangkat derajat keluarga amin
12. Sahabatku paling tersayang Zainab. Terimakasih atas kebersamaan, kesetiaan, doa,

motivasi, dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Yang selalu menemani kemanapun penulis ingin pergi. Yang tidak pernah lelah dengerin penulis cerita. Semoga kita selalu bersama hingga tua nanti dan mencapai kesuksesan yang kita impikan. Amin

13. Yonda Taufan Akbar, terimakasih atas waktu, kesabaran, kesetiaan, semangat, doa dan motivasi yang telah diberikan selama ini. Yang tidak pernah lelah menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Walaupun LDR Lampung-Bandung namun hadirmu dan semangatmu selalu ada untuk penulis. Semoga kita dapat mencapai kesuksesan seperti apa yang kita inginkan. Amin
14. Sahabatku termanis dan termanja a.k.a MM (Ayu Tsanita, Ria Shelawati, Tiara Rifany, Emi Martha Sari, Aliza Puspita). Terimakasih atas segalanya!!! Dari awal masuk kuliah sampai akhir sama-sama terus gak pernah pisah. Sampe nanti wisuda pun kita masih barengan dan *complete*, mungkin kita memang udah ditakdirkan bersama kali yaaa haha. Susah, senang, sedih, bahagia dilewatkan bareng-bareng. Gak pernah berantem, akur terus, banyak khayal, banyak rencana, banyak mau tapi yang terlaksana cuma sedikit hehe. Hal terkecil sampai hal terbesar udah sama-sama tau. Semoga lepas dari masa kuliah kita bisa menjadi orang-orang yang sukses dan bahagia terus yaaa.. dan persahabatan kita sampai tua hingga anak cucu kita seperti apa yang kita mimpikan. Walaupun nanti kita akan sibuk masing-masing, namun biarkan waktu yang menyibukkan kita bukan jarak. Kalian terbaikkkkk..
You're the best thing that I ever had.. see you on top girls
15. Sahabat seperjuangan kampus, Yoanita, Mutiara, Dianisa, Sylvia Yolanda, Maya, Umay, Dilla, Icup, Alli, Bayu, Khoi, Ipul, Lianse, Yogi, Pw, Dara. Terimakasih atas semangat dan bantuan yang telah kalian berikan. Semoga kelak kita menjadi orang

yang berguna bagi bangsa dan negara, amin hehe

16. Sahabatku a.k.a Genq Sirkus (Nadia Azzahra, Resti Ayu Wardhani, Rinda Maulina). Terimakasih atas waktu, cerita dan canda tawa yang kalian berikan selama ini kepada penulis, walaupun sudah sibuk masing-masing tapi dukungan kalian selalu ada. Semoga persahabatan kita *longlasting* yhaaaa kayak lipstick *matte* hehe amin
17. Sahabtku a.k.a team buzzzz (Juliana Stephanie, Vashti Irma Maryam, Khairunisa Marsuma, Fahmi Gumilang, Yoga, Arto). Terimakasih atas canda tawa, kebersamaan yang selama ini kita lalui.. semoga kita selalu dalam perlindungan Allah SWT amin
18. Terimakasih teman-teman seperjuangan ANE 2012 (AMPERA): ajeng, akbar, fajar, ana, ayu widya, betty, frisca, purnama, mbak mona, merita, eko, nadiril, novaria, novi, nyum, omega, putu, , silvia tika, suci, yuli, dan yuyun dan teman-teman lainnya yang tiak disebutkan. Terimakasih atas bantuan, kebersamaan, candatawa, dukungan, dan pengalaman yang diberikan kepada penulis. Semoga pertemanan dan komunikasi kita selalu terjalin walaupun kita udah lulus ☺ tetap semangat amperaa sukses buat kita semua amin
19. Terimakasih untuk teman-teman KKN Desa Marga Mulya Kecamatan Kelumbayan Barat, Kab Tanggamus. bang breri , bery, aan, sepria, vina “cenulku”, mba bertha, dan pipin. Terima kasih buat pengalaman 40 hari yang indah, berkesan, dan yang tak terlupakan sampai kapanpun.
20. Abang dan Mbak HIMAGARA, serta adik-adik ALAS MENARA, GELAS ANTIK, dan ATLANTIK yang selalu mendoakan dalam kesuksesan penulis.
21. Keluarga Besar Universitas Lampung yang telah membantu saya selama saya

belajar di Universitas Lampung.

22. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas bantuannya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi saya berharap kiranya karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin

Bandar Lampung, 27 Juni 2016
Penulis

Widji Ramadani
NPM. 1216041105

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Reformasi Administrasi.....	10
1. Konsep Reformasi Administrasi.....	10
2. Tujuan Reformasi Administrasi.....	12
3. Tipe Reformasi Administrasi.....	14
B. Tinjauan Tentang Refrmasi Birokrasi.....	18
1. Konsep Reformasi Birokrasi.....	18
C. Tinjauan Tentang Inovasi.....	22
1. Konsep Inovasi.....	22
2. Jenis-jenis Inovasi.....	23
D. Tinjauan Tentang Partisipasi Masyarakat.....	24
1. Konsep Partisipasi Masyarakat.....	24
2. Bentuk (Tahap) Partisipasi.....	26
3. Tingkatan Partisipasi.....	29
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat.....	31
5. Pendekatan Partisipasi Masyarakat.....	34
E. Kemiskinan.....	35
1. Konsep Kemiskinan.....	35
F. Kerangka Pikir Penelitian.....	38
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Tipe Penelitian.....	41
B. Fokus Penelitian.....	42

C. Lokasi Penelitian.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Teknik Analisis Data.....	46
F. Teknik Keabsahan Data.....	48

IV. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

A. Profil BPS Kota Bandar Lampung.....	51
B. Visi, Misi dan Nilai-nilai BPS Kota Bandar Lampung.....	53
C. Tugas, Fungsi dan Kewenangan BPS Bandar Lampung.....	56
D. Struktur Organisasi BPS Kota Bandar Lampung.....	58
E. Pengelolaan Data BPS Kota Bandar Lampung.....	60

V. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian.....	63
1. Inovasi BPS dalam Wujud Partisipasi Masyarakat pada Kegiatan PBDT 2015.....	64
2. Bentuk Partisipasi Masyarakat pada Kegiatan PBDT 2015.....	68
A. Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan.....	68
B. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kegiatan.....	75
C. Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan.....	84
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat.....	88
B. Pembahasan.....	94
1. Inovasi BPS dalam Wujud Partisipasi Masyarakat pada Kegiatan PBDT 2015.....	94
2. Bentuk Partisipasi Masyarakat pada Kegiatan PBDT 2015.....	98
a. Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan.....	98
b. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kegiatan.....	100
c. Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan.....	104
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat.....	107

VI. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	114

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir Penelitian.....	40
2. FKP Tingkat Desa.....	70
3. FKP Tingkat di Bawah Desa.....	70
4. Daftar Rumah Tangga Sasaran.....	72
5. Pelaksanaan FKP dipimpin oleh Fasilitator.....	74
6. Kehadiran masyarakat pada kegiatan FKP.....	75
7. Diskusi masyarakat terkait daftar rumah tangga sasaran.....	75
8. Foto Pelatihan Petugas Lapangan di LPMP Lampung.....	77
9. Foto Pelatihan Petugas Lapangan di LPMP Lampung.....	78
10. Dokumen Pengisian Daftar Rumah Tangga Sasaran.....	80
11. Foto kegiatan pengeditan data di BPS Kota Bandar Lampung.....	83
12. Foto kegiatan pengentrian data siang hari di BPS Bandar Lampung.....	83
13. Foto kegiatan pengentrian data malam hari di BPS Bandar Lampung.....	83
14. Foto Kartu Indonesia Sehat (KIS).....	87
15. Foto Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).....	87

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Pengukuran Partisipasi Masyarakat.....	25
2. Tabel Informan Wawancara.....	45

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan fenomena global yang hingga kini masih menjadi isu sentral di belahan bumi manapun, termasuk Indonesia. Menurut Supriatna (2000:36) kemiskinan merupakan masalah utama bagi pembangunan yang sifatnya kompleks dan multi dimensional serta memiliki wujud yang majemuk. Secara umum kondisi kemiskinan ditandai oleh kerentanaan, ketidakberdayaan, keterisolasian, dan ketidakmampuan dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya. Oleh karena sifat kemiskinan yang multi dimensi tersebut maka kemiskinan telah memberi akibat yang juga beragam, mulai dari: (a) secara sosial ekonomi dapat menjadi beban masyarakat; (b) rendahnya kualitas dan produktivitas masyarakat, (c) rendahnya partisipasi masyarakat, (d) menurunnya keterlibatan umum dan ketentraman masyarakat, (e) menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan (f) kemungkinan merosotnya mutu generasi yang akan datang.

Kondisi kemiskinan dirasakan oleh Indonesia akibat krisis ekonomi yang dinyatakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Perlindungan Sosial di Indonesia,

2014) bahwa sebelum periode krisis ekonomi tahun 1997, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kinerja ekonomi tertinggi di Asia dengan rata-rata tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 7,1 persen per tahun dalam periode 1971-1997. Pada saat itu perlindungan sosial belum menjadi bagian dari prioritas pemerintah dan belanja sosial pemerintah hanya terkonsentrasi dalam pelaksanaan pelayanan sosial. Krisis ekonomi tahun 1997-1998 telah membuat krisis multidimensi yang telah menyebabkan banyak penduduk Indonesia masuk ke dalam jurang kemiskinan. Hal ini memberikan kesadaran tentang kerentanan kondisi ekonomi Indonesia, serta pentingnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia memiliki sistem perlindungan sosial yang diawali dengan kebijakan Jaring Pengaman Sosial (JPS) nasional. Sistem perlindungan sosial yang terdiri dari program jaminan sosial dan bantuan sosial ini terus mengalami perkembangan.

Sistem perlindungan sosial ini diamanatkan pula dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan konstitusi negara. Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Tercermin juga dalam pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan pasal 31 UUD 1945 yang menjamin hak tiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Pasal 34 UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak

telantar dipelihara oleh negara dan negara wajib mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan sosial yang bersifat nasional.

Menurut Badan Pusat Statistik (Pemutakhiran Basis Data Terpadu, 2015), perlindungan sosial merupakan bagian dari visi, misi, dan program dari pemerintah yang dikenal dengan “Nawa Cita”, yang berarti 9 agenda perubahan. Salah satunya adalah mengenai peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program perlindungan sosial. Berbagai program yang dimaksud adalah Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH) dan lain- lain.

Pelaksanaan program tersebut dibutuhkan data dan informasi mengenai sasaran dalam bentuk Basis Data Terpadu (BDT). Pemerintah menugaskan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengumpulkan dan mengolah data rumah tangga atau keluarga sasaran melalui kegiatan Pemutakhiran Basis Data Tepadu (PBDT) 2015. BPS telah melakukan kegiatan serupa pada Pendataan Sosial Ekonomi 2005 (PSE05), Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2008, dan PPLS 2011.

Kegiatan PBDT 2015 adalah kegiatan nasional untuk melakukan perbaikan terhadap data karakteristik rumah tangga basis data terpadu. BDT merupakan hasil PPLS 2011 dan sumber data lain yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dari 2012-2014, misalnya rumah tangga pengganti penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) hasil musyawarah desa/kelurahan (musdes/muskel). Menurut Badan Pusat Statistik dalam (Pemutakhiran Basis Data Terpadu, 2015),

kegiatan PBDT 2015 perlu dilakukan karena selama periode 2011-2015 telah terjadi perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat khususnya penerima bantuan program perlindungan sosial, dan pada kegiatan sebelumnya yaitu PPLS 2011 dari hasil uji petik TNP2K (nasional) hanya terdapat 90-95% Rumah Tangga Sasaran(RTS) yang ditemukan serta ditemukan data yang tidak tepat sasaran. Hal ini menunjukkan data yang dihasilkan tidak akurat dan cakupan pendataan yang kurang.

Kegiatan PBDT 2015 dilaksanakan berdasarkan Inpres No. 7 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif. Tujuan utama kegiatan PBDT 2015 adalah untuk memperoleh keterangan rumah tangga dan anggota rumah tangga BDT kondisi tahun 2015 sebagai data dan informasi mutakhir. Dengan tersedianya data tersebut kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah maupun swasta dapat menggunakannya untuk penetapan sasaran program.

Keterkaitan BPS dengan hal tersebut sebagai penyaji data yaitu harus lebih teliti dan hati-hati dalam meningkatkan akurasi data dan ketepatan sasaran, yakni dengan mengurangi *exclusion error* (kesalahan karena tidak memasukan rumah tangga miskin yang seharusnya masuk ke dalam data) dan *inclusion error* (kesalahan karena memasukkan rumah tangga yang tidak miskin ke dalam data). Demikian yang dilakukan oleh BPS Kota Bandar Lampung dalam PBDT 2015 yang memverifikasi 82.500 rumah tangga sasaran. BPS Kota Bandar Lampung melakukan inovasi dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan statistik yang

bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan akurasi data yang disajikan BPS untuk kepentingan pembangunan.

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini diantaranya melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP), yaitu forum pertemuan untuk bertanya jawab bersama dengan publik/masyarakat. Kegiatan dalam FKP diantaranya memeriksa kesesuaian antara isi daftar tercetak dengan nama dan alamat setiap kepala rumah tangga di wilayah tersebut, maka nantinya akan diperoleh daftar rumah tangga yang akan dimutakhirkan. Masyarakat dilibatkan pula dalam proses pencacahan di lapangan dan proses pengentrian data setelah melalui pelatihan terlebih dahulu. Pelatihan perlu dilakukan mengingat dari pendataan yang telah dilakukan sebelumnya masih banyak terdapat data yang tidak akurat dan salah sasaran. Oleh karena itu inovasi dengan melibatkan masyarakat sangat diperlukan dalam hal seperti ini. Disisi lain Mulyono selaku Ketua BPS Kota Bandar Lampung berharap dengan adanya peran serta masyarakat di berbagai kegiatan BPS Kota Bandar Lampung, maka BPS dapat semakin menyajikan data yang berkualitas untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan.

Adanya inovasi tersebut, BPS Kota Bandar Lampung berusaha untuk lebih baik lagi dalam menyajikan data untuk kepentingan pembangunan. Reformasi birokrasi merupakan solusi yang tepat untuk menangani masalah yang ada terkait akurasi data yang tidak valid dan pendataan yang tidak tepat sasaran karena konsep reformasi adalah perubahan dimana kedalamannya terbatas sedangkan keluasannya melibatkan seluruh masyarakat. Sebagai perubahan yang terbatas tetapi seluruh

masyarakat terlibat, reformasi juga mengandung pengertian penataan kembali bangunan masyarakat, termasuk cita-cita, lembaga-lembaga, dan saluran yang ditempuh dalam mencapai cita-cita. Reformasi birokrasi memberi harapan terhadap pelayanan publik yang lebih adil dan merata.

Reformasi birokrasi BPS sendiri dilaksanakan sejak tahun 2010 dengan membangun visi, misi, *blue print* dan *road map*. Tujuan reformasi birokrasi BPS adalah untuk membangun profil dan perilaku aparatur BPS yang professional, berintegritas, dan mengemban amanah dalam memberikan pelayanan prima atas hasil data dan informasi statistik yang berkualitas. Sehingga kepercayaan para pengguna data meningkat dan mereka dapat mengakses data dan informasi statistik dengan lebih cepat dan lebih mudah.

Berbagai bentuk perubahan yang dilakukan oleh BPS dalam rangka reformasi birokrasi adalah penataan dan penguatan organisasi, penataan peraturan perundang-undangan, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penataan tatalaksana, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, manajemen perubahan, monitoring dan evaluasi. Harapan demikian dihubungkan dengan menguatnya kontrol masyarakat dan besarnya kontribusi masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan PBDT 2015 dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di Kota Bandar Lampung. Sehingga dengan semakin besarnya peran masyarakat dalam proses kegiatan ini, dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tingkat akurasi data meningkat dan tepat sasaran.

Pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada inovasi kegiatan PBDT 2015 yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Inovasi merupakan salah satu bentuk dari reformasi birokrasi yang menjadi fokus utama dari reformasi administrasi. Karena salah satu budaya birokrasi yang sangat penting bagi reformasi birokrasi adalah berkembangnya inovasi dalam instansi pemerintah. Inovasi sangat penting karena memungkinkan birokrasi untuk berfungsi lebih dinamis dan melakukan *improvement*. Menurut Vontana (2009:20), inovasi adalah kesuksesan ekonomi dan sosial berkat diperkenalkannya cara baru atau kombinasi baru dari cara-cara lama dalam mentransformasi *input* menjadi *output* yang menciptakan perubahan besar dalam hubungan antara nilai guna dan harga yang ditawarkan kepada konsumen dan/atau pengguna, komunitas, dan lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melihat lebih dekat tentang inovasi yang di lakukan BPS Kota Bandar Lampung dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan PBDT 2015 dengan judul “Inovasi Kegiatan PBDT 2015 Melalui Partisipasi Masyarakat dalam Penetapan Sasaran Program Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Studi di Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana inovasi yang dilakukan BPS dalam wujud partisipasi masyarakat pada kegiatan PBDT 2015?
2. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PBDT 2015 pada tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil pembangunan?
3. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat pada pelaksanaan kegiatan PBDT 2015?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian tersebut, penulis memiliki tujuan, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis inovasi yang dilakukan BPS Kota Bandar Lampung dalam wujud partisipasi masyarakat pada kegiatan PBDT 2015.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PBDT 2015 pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil pembangunan.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PBDT 2015.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam kajian Ilmu Administrasi Negara khususnya di bidang reformasi birokrasi.

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan bagi Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung untuk terus mengembangkan inovasi guna meningkatkan kinerja dan akurasi data yang disajikan BPS Kota Bandar Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Reformasi Administrasi

1. Konsep Reformasi Administrasi

Dewasa ini istilah reformasi administrasi merupakan bagian yang sangat penting dalam pembangunan di negara-negara sedang berkembang, terlepas dari tingkat perkembangan atau kecepatan pertumbuhan dan arah serta tujuannya. Sebagai konsekuensi logisnya, maka reformasi administrasi di negara sedang berkembang menjadi keharusan dan menjadi perhatian utama pemerintah negara sedang berkembang. Istilah reformasi administrasi mengandung begitu banyak makna, mempunyai fungsi yang beragam, menimbulkan begitu banyak harapan, tetapi juga membawa “pertengkaran” yang tak kunjung usai di kalangan praktisi, pemerhati, masyarakat dan kaum teoritis. Menurut Zauhar (2012:11) Reformasi Administrasi adalah kegiatan penataan birokrasi; reformasi administrasi adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mengubah struktur dan prosedur birokrasi serta sikap dan perilaku birokrat guna meningkatkan efektivitas organisasi atau terciptanya administrasi yang sehat dan menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Dalam bidang penyajian data, reformasi dibutuhkan untuk mengatasi data yang tidak akurat yang selama ini menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat. Kualitas pelayanan yang rendah membutuhkan suatu perubahan yang nyata dan reformasi administrasi merupakan langkah yang tepat dalam memperbaiki kualitas layanan tersebut. Derajat pencapaian tujuan merupakan tolak ukur di dalam menetapkan sukses atau gagalnya program reformasi administrasi. Dror dalam Zauhar (2012:14) berpendapat bahwa reformasi pada hakekatnya merupakan usaha yang berorientasi pada tujuan jamak. Ia mengklasifikasikan tujuan reformasi ke dalam enam kelompok, tiga bersifat intra-administrasi yang ditujukan untuk menyempurnakan administrasi internal, dan tiga lagi berkenaan dengan peran masyarakat di dalam sistem administrasi.

Menurut Zauhar (2012:9) suatu seminar tentang penyempurnaan administrasi yang diselenggarakan oleh *Eastern Regional Organizational for Public Administration* (EROPA), dikemukakan 5 alat pengukur reformasi administrasi. Kelima alat pengukur tersebut adalah:

- a. Penekanan baru terhadap program
- b. Perubahan sikap dan perilaku masyarakat dan anggota birokrasi
- c. Perubahan gaya kepemimpinan yang mengarah kepada komunikasi terbuka dan manajemen partisipatif
- d. Penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan
- e. Pengurangan penggunaan pendekatan legalistik

2. Tujuan Reformasi Administrasi

Menurut Marshall E. Dimock dalam Zauhar (2012:13) menyatakan bahwa tujuan utama reorganisasi adalah untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Dengan nada yang hampir sama Carlos P. Ramos dalam Zauhar (2012:14) menyatakan bahwa tujuan peningkatan efektivitas administrasi berkaitan erat dengan pencapaian tujuan umum pembangunan nasional, karena keberhasilan reformasi administrasi merupakan salah satu ukuran yang dipakai oleh pemerintah Negara sedang berkembang dalam mencapai tujuan pembangunan.

Menurut Abueva dalam Zauhar (2012:14), menyebut dua tujuan *administrative reform*, yakni:

- a. *Manifest or declared goal* (tujuan terbuka), yaitu efisiensi, ekonomis, efektivitas, peningkatan pelayanan, struktur organisasi dan prosedur yang ramping dan lain sebagainya.
- b. *Undisclosed or undeclared goal* (tujuan terselubung), yaitu tujuan yang bersifat politik.

Menurut Dror dalam Zauhar (2012:14), bahwa reformasi pada hakekatnya merupakan usaha yang berorientasi pada tujuan jamak. Ia mengklasifikasikan tujuan reformasi ke dalam 6 kelompok, tiga bersifat intra-administrasi, dan tiga lagi berkenaan dengan peran masyarakat di dalam sistem administrasi. Tiga tujuan internal reformasi administrasi yang dimaksud meliputi:

- a) Efisiensi administrasi, dalam arti penghematan uang, yang dapat dicapai melalui penyederhanaan formulir, perubahan prosedur, penghilangan duplikasi dan kegiatan organisasi metode yang lain.
- b) Penghapusan kelemahan atau penyakit administrasi seperti korupsi, pilih kasih dan sistem teman dalam sistem politik dan lain-lain.
- c) Pengenalan dan penggalakan sistem merit, pemakaian PPBS, pemrosesan data melalui sistem informasi yang otomatis, peningkatan penggunaan pengetahuan ilmiah dan lain-lain.

Sedangkan tiga tujuan lain yang berkaitan dengan masyarakat menurut Dror dalam Zauhar (2012:15) adalah:

- a. Menyesuaikan sistem administrasi terhadap meningkatnya keluhan masyarakat.
- b. Mengubah pembagian pekerjaan antara sistem administrasi dan sistem politik, seperti misalnya meningkatkan otonomi profesional dan sistem administrasi dan meningkatkan pengaruhnya pada suatu kebijaksanaan.
- c. Mengubah hubungan antara sistem administrasi dan penduduk, misalnya melalui relokasi pusat-pusat kekuasaan (*sentralisasi versus desentralisasi*, demokratisasi dan lain-lain).

Tujuan dilakukannya Reformasi Administrasi, menurut Hahn Been Lee dalam Zauhar (2012:44-48) dapat dikategorikan ke dalam:

- a. Penyempurnaan tatanan

- b. Penyempurnaan metode
- c. Penyempurnaan unjuk kerja

Karena masing-masing tujuan mempunyai ciri yang berbeda satu sama lain, maka tipe reformasi yang dilakukannya harus berbeda pula. Untuk mencapai penyempurnaan tatanan jelas diperlukan tipe reformasi yang berbeda apabila tujuan yang ingin dicapai adalah penyempurnaan metode ataupun penyempurnaan unjuk kerja.

3. Tipe Reformasi Administrasi

Menurut Han Been Lee dalam Zauhar (2012:44), untuk memudahkan pemilihan tipe reformasi yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai, Han Been Lee membuat keterkaitan antar beberapa komponen sebagai berikut:

- a. Penyempurnaan Tatanan dan Reformasi Prosedur

Baik dalam masyarakat tradisional maupun dalam masyarakat modern, *order* atau keteraturan merupakan kebajikan yang melekat dalam pemerintahan. Lebih-lebih dalam masyarakat transisional (*prismatik*) yang sedang melaksanakan pembaruan besar-besaran, dimana otoritas tradisional mulai digeser oleh otoritas kekuatan sosial baru, semuanya mengklaim bahwa mereka berkuasa. Dalam situasi seperti ini, massa rakyat, kecuali mereka yang berasal dari kelompok sosial baru, cenderung bernostalgia dengan tatanan lama, terutama sekali pada masyarakat yang baru lepas dari genggaman cengkraman penjajah.

Guna menanggulangi masalah seperti itu maka reformasi sudah selayaknya kalau diarahkan pada penciptaan prosedur dan membangun rutinitas. Dalam suatu negara yang baru saja lepas dari cengkraman penjajah, yang situasinya masih kacau balau, administrasi identik dengan keteraturan (*order*). Konsep semacam ini tidak diperlukan jika pemerintahan dipegang oleh mereka yang berideologi nasionalis. Sedikit sekali penganut paham ini yang tertarik pada masalah prosedural, dan karenanya jarang yang senang apalagi mendalangi dan mensponsori usaha reformasi administrasi. Apabila yang ingin dituju adalah penyempurnaan tatanan, mau tidak mau reformasi harus diorientasikan pada penataan prosedur dan kontrol. Yang sangat diperlukan oleh administrator dalam era baru ini adalah menghadang agen pembaru. Sebagai konsekuensi logisnya maka birokrasi yang kokoh dan tegar perlu segera dibangun.

b. Penyempurnaan Metode dan Reformasi Teknis

Jika penyempurnaan tatanan merupakan produk dari adanya kekacauan, maka dorongan untuk melakukan penyempurnaan metode biasanya merupakan hasil *stimulans* dari pihak luar. Sedikit banyak, para administrator haruslah merupakan pekerja teknis yang mengetahui banyak tentang teknik dan metode kerja. Sebagai akibatnya maka mereka harus fanatik terhadap metode. Jika masyarakat semakin mendukung terhadap adanya administrator teknis, maka administrator harus semakin fanatik terhadap metode. Tetapi sebaliknya apabila masyarakat semakin berorientasi terhadap status, maka semakin

kurang tuntutan terhadap administrator yang fanatik terhadap metode. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa administrator publik dalam masyarakat yang sudah maju secara teknologi, dituntut semakin lebih fanatik terhadap metode daripada administrator publik di negara yang kurang maju secara teknologis.

Penyempurnaan metode sebagai tujuan adalah berorientasi pada teknis, tetapi yang perlu diingat bahwa di dalam administrasi negara teknik itu sendiri tidak bernilai tanpa adanya pihak lain yang menggunakannya. Teknik itu baru bernilai manakala tujuan yang lebih luas yang dicapai dengan teknik itu tampak dengan jelas. Jadi tanpa adanya tujuan pemerintahan yang diformulasikan dengan bagus dan dengan program yang dapat diterima, penyempurnaan metode dan teknik administrasi dianggap sebagai kontrol otokratis dari birokrasi terhadap masyarakat. Di lain pihak, apabila tujuan utama reformasi administrasi diartikulasikan dengan baik secara efektif diterjemahkan ke dalam program aksi yang nyata, penyempurnaan metode akan memperbaiki implementasi program, dan oleh karenanya dapat meningkatkan realisasi pencapaian tujuan.

c. Penyempurnaan Unjuk Kerja dan Reformasi Program

Penyempurnaan unjuk kerja lebih bernuansa tujuan dalam substansi program kerjanya daripada penyempurnaan keteraturan maupun penyempurnan metode teknis administratif. Fokus utamanya adalah pada pergeseran dari bentuk ke substansi, pergeseran dari kecakapan birokrasi ke kesejahteraan masyarakat. Tipe administrasi semacam inilah yang sulit dijumpai di kebanyakan negara

sedang berkembang dimana tujuan administrasinya masih pada hukum dan ketertiban. Situasi semacam ini ideologi politik cenderung diserap secara umum, sementara itu birokrasinya terlalu di orientasikan pada masalah prosedural. Paling sering prioritas yang berlebih pada masalah prosedur ini akan menyebabkan digunakannya metode dan teknik baru yang diimpor dari tempat lain dengan berbagai alasan yang dibuat-buat.

Penekanan baru terhadap unjuk kerja program hanya akan ada jika pemerintah negara sedang berkembang betul-betul menginginkan pembangunan sosial ekonomi yang sungguh-sungguh. Begitu keinginan muncul, lahirilah pendekatan baru yang mempunyai sifat yang khas dalam reformasi administrasi. Keluaran menjadi kata kunci, metode dan prosedur yang sudah ada mulai dibenahi. Bibit baru administrator diambil dari lingkungan non birokrasi yang setelah melalui proses tertentu baru diperkenalkan ke dalam jajaran birokrasi. Organisasi baru banyak dibentuk bahkan terkesan sangat berlebihan. Prosedur baru di bidang keuangan yang lebih fleksibel mulai diperkenalkan, yang pada hakikatnya tumbuh dengan prosedur yang lama. Maka terjadinya struktur kembar dan prosedur ganda tak dapat dielakkan. Selain itu terjadi pula perkembangan birokrasi yang agak aneh. Sementara organisasi lama masih menjalankan fungsinya, organisasi baru diciptakan dengan tujuan untuk memperlemah aturan yang masih ada. Dari sudut pandang simetri organisasi dan keteraturan prosedur, situasi kacau balau masih saja terjadi. Terlepas dari adanya kebingungan ini, dengan masih

adanya program kerja tersebut memaksa birokrasi untuk tetap bergerak. Dengan begitu maka di dalam kenyataannya reformasi masih tetap saja berlangsung.

B. Tinjauan Reformasi Birokrasi

1. Konsep Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi adalah fokus utama dari reformasi administrasi yang merupakan suatu kebijakan strategis yang dilaksanakan secara konsisten. Pelaksanaan kebijakan ini merupakan upaya untuk menghindarkan birokrasi dari keterpurukan yang parah di masa yang akan datang. Karena itu telah ditetapkan *Grand`Design Reformasi Birokrasi (2010-2025)* sebagai pedoman bagi semua pihak untuk melaksanakannya. Dalam *Grand Design* tersebut, ditetapkan beberapa prinsip-prinsip dan asas reformasi birokrasi bagi kementerian, lembaga negara dan pemerintah daerah. Secara umum reformasi birokrasi bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat
- b. Meningkatkan mutu pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan/program
- c. Meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi
- d. Menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan

- e. Menjadikan negara yang memiliki *most-improved bureaucracy*, birokrasi dengan kualitas pelayanan kelas dunia

Secara teoritis, reformasi dalam Sinambela (2008:70) adalah perubahan dimana kedalamannya terbatas sedangkan keluasannya perubahannya melibatkan seluruh masyarakat. Sedangkan menurut Blau dalam Sinambela (2008:7) birokrasi adalah organisasi yang ditujukan untuk memaksimalkan efisiensi dalam administrasi yang menurut Sayre memiliki ciri-ciri; spesialisasi tugas-tugas, hirarki otoritas, badan perundang-undangan, sistem pelaporan, dan personil dengan keterampilan dan peranan khusus. Weber sendiri sebagai pembahas birokrasi memberikan ciri-ciri yang lebih rinci hingga disebut sebagai organisasi yang rasional (*ideal types*), tidak sekalipun dimaksudkan menciptakan bentuk inefisiensi di dalam organisasi pemerintahan negara. Dari pemahaman ini birokrasi pemerintah mestinya tidak menjadi buruk dalam menjalankan tugas dan fungsinya

Menurut Dwiyanto (2012:50-51) ada beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu sebagai berikut:

1. Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian *General Accounting Office (GAO)* mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas

dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

2. Kualitas Layanan

Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan terhadap kualitas pelayanan seringkali dapat diperoleh dari media massa dan diskusi publik. Akibat akses terhadap informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan relatif sangat tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kinerja organisasi publik yang mudah dan murah untuk dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik.

3. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas di sini menunjuk pada keselarasan program dan kegiatan pelayanan

dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang buruk juga.

4. Responsibilitas

Responsibilitas menunjukkan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun ilmplisit. Oleh sebab itu, responbilitas bisa saja pada suatu berbenturan dengan responsivitas.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsimya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapatdigunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan

oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang di masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa reformasi birokrasi merupakan upaya suatu organisasi publik baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta dalam menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan kaidah yang telah ada yang tujuan utamanya adalah kepuasan masyarakat.

C. Tinjauan Inovasi

1. Konsep Inovasi

Inovasi adalah salah satu hasil dari reformasi birokrasi publik. Reformasi birokrasi publik merupakan fokus utama dari reformasi administrasi, maka dari itu inovasi dapat dikatakan sebagai kepanjangan tangan dari reformasi administrasi yang merupakan bentuk dari ide kreativitas perusahaan atau organisasi dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan.

Menurut Setiadi (2003:394), inovasi dapat didefinisikan dengan bermacam cara. Definisi yang paling lazim diterima adalah bahwa inovasi adalah ide atau produk apapun yang dirasakan oleh calon adopter sebagai sesuatu yang baru. Adopter itu sendiri adalah hasil dari proses yang memperlihatkan bahwa beberapa anggota sistem sosial. Menurut definisi ini, produk baru adalah ide, perilaku, atau barang yang secara

kualitatif berbeda dengan bentuk yang sudah ada. Sedangkan menurut Ellitan (2009:3), Inovasi merupakan sistem aktivitas organisasi yang mentransformasikan teknologi mulai dari ide sampai komersialisasi. Inovasi mengacu kepada pembaharuan produk, proses, dan jasa baru. Menurut Zangwill dalam Ellitan (2009:10), inovasi merupakan suatu hal yang penting dalam mencapai keunggulan kompetitif. Tanpa inovasi, perusahaan akan mati. Perusahaan yang melakukan inovasi secara terus-menerus akan dapat mendominasi pasar, dengan kreasi, model dan penampilan produk yang baru. Pada akhirnya strategi inovasi akan memunculkan keunikan produk yang sulit ditiru pesaing.

Menciptakan inovasi pada bidang penyedia data adalah suatu keharusan untuk dilakukan, bahkan harus terus menerus diperbaharui karena masyarakat semakin hari semakin peduli dengan kebutuhan data-data yang ada. Namun, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam menciptakan inovasi bukan hal yang mudah untuk dilakukan, karena harus melalui proses yang cukup rumit.

2. Jenis-jenis Inovasi

Menurut Robertson dalam Setiadi(2003:395) jenis-jenis inovasi antara lain:

a. Inovasi terus-menerus

Adalah modifikasi dari produk yang sudah ada dan bukan pembuatan produk yang baru sepenuhnya. Inovasi ini menimbulkan pengaruh yang paling tidak mengacaukan pola perilaku yang sudah mapan. Contohnya antara lain, menambahkan *fluoride* pada pasta gigi, memperkenalkan perubahan model baru, menambahkan mentol pada

rokok atau mengubah panjang rokok, dan mengganti printer *dot-matrix* dengan perinter *daisy wheel* atau *printet laser*.

b. Inovasi terus menerus secara dinamis

Mungkin melibatkan penciptaan produk baru atau perubahan produk yang sudah ada, tetapi pada umumnya tidak mengubah pola yang sudah mapan dari kebiasaan belanja pelanggan dan pemakaian produk. Contohnya antara lain, sikat gigi listrik, *compact disk*, makanan alami, dan raket tenis yang besar sekali.

c. Inovasi terputus

Melibatkan pengenalan sebuah produk yang sepenuhnya baru yang menyebabkan pembeli mengubah secara signifikan pola perilaku mereka. Contohnya antara lain, komputer, *videocassete recorder*, *produk videotext* seperti basis data terkomputerisasi untuk belanja dan *oven microwave*.

D. Tinjauan Tentang Partisipasi Masyarakat

1. Konsep Partisipasi Masyarakat

Menurut Jnana Bhattacharyya dalam Ndraha (1990:102) mengartikan partisipasi sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo dalam Ndraha (1990:14), Partisipasi dilakukan oleh masyarakat sebagai keterlibatan Masyarakat dalam penentuan arah, strategi, dan kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah, keterlibatan masyarakat dalam memikul beban dan dalam memetik hasil atau manfaat pembangunan. Menurut Notoatmodjo

dalam Budiardjo (2004:28) bahwa di dalam partisipasi setiap anggota masyarakat dituntut suatu kontribusi atau sumbangan. Kontribusi tersebut bukan hanya terbatas pada dana dan finansial saja tetapi dapat berbentuk daya (tenaga) dan ide (pemikiran). Dalam hal ini dapat diwujudkan di dalam 4 M, yakni *manpower* (tenaga), *money* (uang), *material* (benda-benda lain seperti kayu, bambu, beras, batu, dan sebagainya), dan *mind* (ide atau gagasan). Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan memperbaiki mutu-hidup mereka. Artinya, melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparat pemerintah sendiri, tetapi menuntut juga keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu-hidupnya. Menurut Theresia (2014:312), keberhasilan proses pembangunan berbasis masyarakat dapat diukur dengan indikator-indikator partisipasi masyarakat yang meliputi:

Tabel 1. Pengukuran Partisipasi Masyarakat

Variabel	Indikator	Sub-Indikator
Partisipasi	Keterlibatan	Kehadiran Penyampaian pendapat Kualitas pendapat
	Kesukarelaan	Spontan Terinduksi Pemaksaan
	Lingkup kegiatan	Pengambilan keputusan Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi Pemanfaatan hasil

Sumber: (*Buku Pembangunan Berbasis Masyarakat, 2014*)

2. Bentuk (Tahap) Partisipasi

Menurut Ndraha (1990:103-104) bentuk atau tahap partisipasi meliputi:

- a. Partisipasi dalam melalui kontak dengan pihak lain sebagai salah satu titik awal perubahan sosial
- b. Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberikan tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi, melaksanakan), mengiakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya
- c. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan
- d. Partisipati dalam pelaksanaan operasional pembangunan
- e. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan
- f. Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat

Sedangkan menurut Effendi dalam Dwiningrum (2011:58) membagi partisipasi dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Partisipasi Vertikal

Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien.

b. Partisipasi Horizontal

Masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat dalam tahap pembangunan ada beberapa bentuk. Menurut Yadav dalam Theresia (2014:198-199) bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu:

a. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Pada umumnya, setiap program pembangunan (termasuk pemanfaatan sumberdaya lokal dan alokasi anggaran) selalu ditetapkan oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukannya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses

pengambilan keputusan. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan.

b. Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan

Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang ataupun material/barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut.

c. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.

Selanjutnya, Holil dalam Rukminto (2007:21) mengemukakan adanya beberapa bentuk partisipasi, yaitu:

- a. Partisipasi dalam bentuk tenaga. Merupakan partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program
- b. Partisipasi dalam bentuk uang. Merupakan bentuk partisipasi masyarakat untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian suatu program pembangunan.

- c. Partisipasi dalam bentuk harta benda. Merupakan bentuk partisipasi dengan menyumbang harta benda.

3. Tingkatan Partisipasi

Menurut Wilcox dalam Theresia (2014:202) mengungkapkan adanya lima tingkatan, yaitu:

- a. Memberi informasi (*Information*)
- b. Konsultasi (*Concultation*) yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut.
- c. Pengambilan keputusan bersama (*Deciding together*), dalam arti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan.
- d. Bertindak bersama (*Acting together*), dalam arti tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya.
- e. Memberikan dukungan (*Supporting independent community interest*) dimana kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasihat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

Menurut Prety dalam Syahyuti (2006), ada tujuh karakteristik tipologi partisipasi, yaitu:

- a. Partisipasi pasif atau manipulatif, merupakan bentuk partisipasi yang paling lemah. Karakteristiknya adalah masyarakat menerima pemberitahuan apa yang sedang dan telah terjadi. Pengumuman sepihak oleh pelaksana proyek tidak memperhatikan tanggapan masyarakat sebagai sasaran program.
- b. Partisipasi informatif, disini masyarakat hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk proyek, namun tidak berkesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses keputusan.
- c. Partisipasi konsultif, masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi, sedangkan orang luar mendengarkan, serta menganalisis masalah dan pemecahannya. Dalam pola ini belum ada peluang untuk pembuatan keputusan bersama.
- d. Partisipasi intensif, masyarakat memberikan korbanan dan jasa untuk memperoleh imbalan intensif berupa upah, walau tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran atau eksperimen-eksperimen yang dilakukan. Masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah intensif dihentikan.
- e. Partisipasi fungsional, masyarakat membentuk kelompok sebagai bagian proyek, setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati. Pada tahap awal, masyarakat tergantung pada pihak luar tetapi secara bertahap kemudian menunjukkan kemandiriannya, menunjukkan kemandiriannya.
- f. Partisipasi interaktif, masyarakat berperan dalam proses analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan.

- g. Mandiri (*self mobilization*), masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi pihak luar) untuk merubah sistem atau nilai-nilai yang mereka junjung.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Faktor internal

Menurut Slamet (2003:97) faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Tingkah laku individu berhubungan atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan, dan penghasilan. Menurut Slamet (2003:137-143) secara teoritis terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterliatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi.

Menurut Plumer dalam Suryawan (2004:27), beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah:

- a. Pengetahuan dan keahlian: dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut hal ini membuat

masyarakat memahami ataupun tidak terhadap tahap-tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada.

- b. Pekerjaan masyarakat: biasanya pekerjaan dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat lebih meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi.
- c. Tingkat pendidikan dan buta huruf: faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada.
- d. Jenis kelamin: sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan.
- e. Kepercayaan terhadap budaya tertentu: masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang digunakan.

b. Faktor eksternal

Menurut Sunarti (2003:9), faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (*stakeholder*) yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh

terhadap program ini. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program.

Nijjab dalam Huraerah (2011:121-122) menjelaskan bahwa keberhasilan partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh:

- a. Siapa penggagas partisipasi, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah atau LSM. *Non government stakeholders* berpeluang untuk lebih lanjut.
- b. Untuk kepentingan siapa partisipasi itu dilaksanakan, apakah untuk kepentingan pemerintah atau untuk masyarakat.
- c. Siapa yang memegang kendali, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga donor. Jika pemerintah daerah dan LSM yang memegang kendali cenderung lebih berhasil. Hal ini dikarenakan cenderung mengetahui permasalahan, kondisi, dan kebutuhan daerah atau masyarakatnya dibandingkan pihak luar.
- d. Hubungan pemerintah dengan masyarakat, apakah ada kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintahannya. Jika hubungan ini baik, partisipasi akan lebih mudah dilaksanakan.
- e. Kultural, daerah yang masyarakatnya memiliki tradisi dalam berpartisipasi cenderung lebih mudah dan berlanjut.
- f. Politik, pemerintahan yang stabil serta menganut sistem yang transparan, menghargai keragaman, dan demokratis.
- g. Legalitas, tersedianya regulasi yang menjamin partisipasi warga dalam pengeolaan pembangunan.

- h. Ekonomi, adanya mekanisme yang menyediakan akses bagi warga miskin untuk terlibat atau memastikan bahwa mereka akan memperoleh manfaat baik langsung ataupun tidak langsung setelah berpartisipasi.
- i. Tersedianya jaringan yang menghubungkan antara warga masyarakat dan pemerintah (forum warga)

5. Pendekatan Partisipasi Masyarakat

Menurut Club du Sahel dalam Budiardjo (2004:31), beberapa pendekatan untuk memajukan partisipasi masyarakat yaitu:

1. Pendekatan pasif, pelatihan dan informasi; yakni pendekatan yang beranggapan bahwa pihak eksternal lebih menguasai pengetahuan, teknologi, keterampilan dan sumber daya. Dengan demikian partisipasi tersebut memberikan komunikasi satu arah, dari atas ke bawah dan hubungan pihak eksternal dan masyarakat bersifat vertikal.
2. Pendekatan partisipasi aktif; yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinteraksi secara lebih intensif dengan para petugas eksternal, contohnya pelatihan dan kunjungan.
3. Pendekatan partisipasi dengan keterikatan; masyarakat atau individu diberikan kesempatan untuk melakukan pembangunan, dan diberikan pilihan untuk terikat pada sesuatu kegiatan dan bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.

4. Pendekatan dengan partisipasi setempat; yaitu pendekatan dengan mencerminkan kegiatan pembangunan atas dasar keputusan yang diambil oleh masyarakat setempat.

E. Tinjauan Tentang Kemiskinan

1. Konsep Kemiskinan

Kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas. Chambers dalam Suryawati (2005 : 1) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *intergrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*poverty*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4) ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis. Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat kesehatan dan pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri . Kemiskinan dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

1. Kemiskinan absolut, kondisi dimana seseorang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja.

2. Kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.

3. Kemiskinan kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.

4. Kemiskinan struktural, situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan. Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

a. Kemiskinan alamiah, berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus.

b. Kemiskinan buatan, lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak mendapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.

Menurut Nasikun dalam Suryawati (2005 : 34), beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:

a. *Policy induces processes*, yaitu proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan, diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi realitanya justru melestarikan.

- b. *Socio-economic dualism*, negara bekas koloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marginal karena tanah yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor.
- c. *Population growth*, perspektif yang didasari oleh teori Malthus, bahwa pertumbuhan penduduk seperti deret ukur sedangkan pertumbuhan pangan seperti deret hitung.
- d. *Resources management and the environment*, adalah unsur *mismanagement* sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas.
- e. *Natural cycle and processes*, kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggalkan lahan kritis, dimana lahan itu jika turun hujan akan terjadi banjir, akan tetapi jika musim kemarau kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus.
- f. *The marginalization of woman*, peminggiran kaum perempuan karena masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang lebih rendah dari laki-laki.
- g. *Cultural and ethnic factors*, bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan. Misalnya pada pola konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan.

h. *Exploitatif inetrmediation*, keberadaan penolong yang menjadi penodong, seperti rentenir. diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan.

i. *Interbational processe*, bekerjanya sistem internasional (kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi miskin.

F. Kerangka Pikir

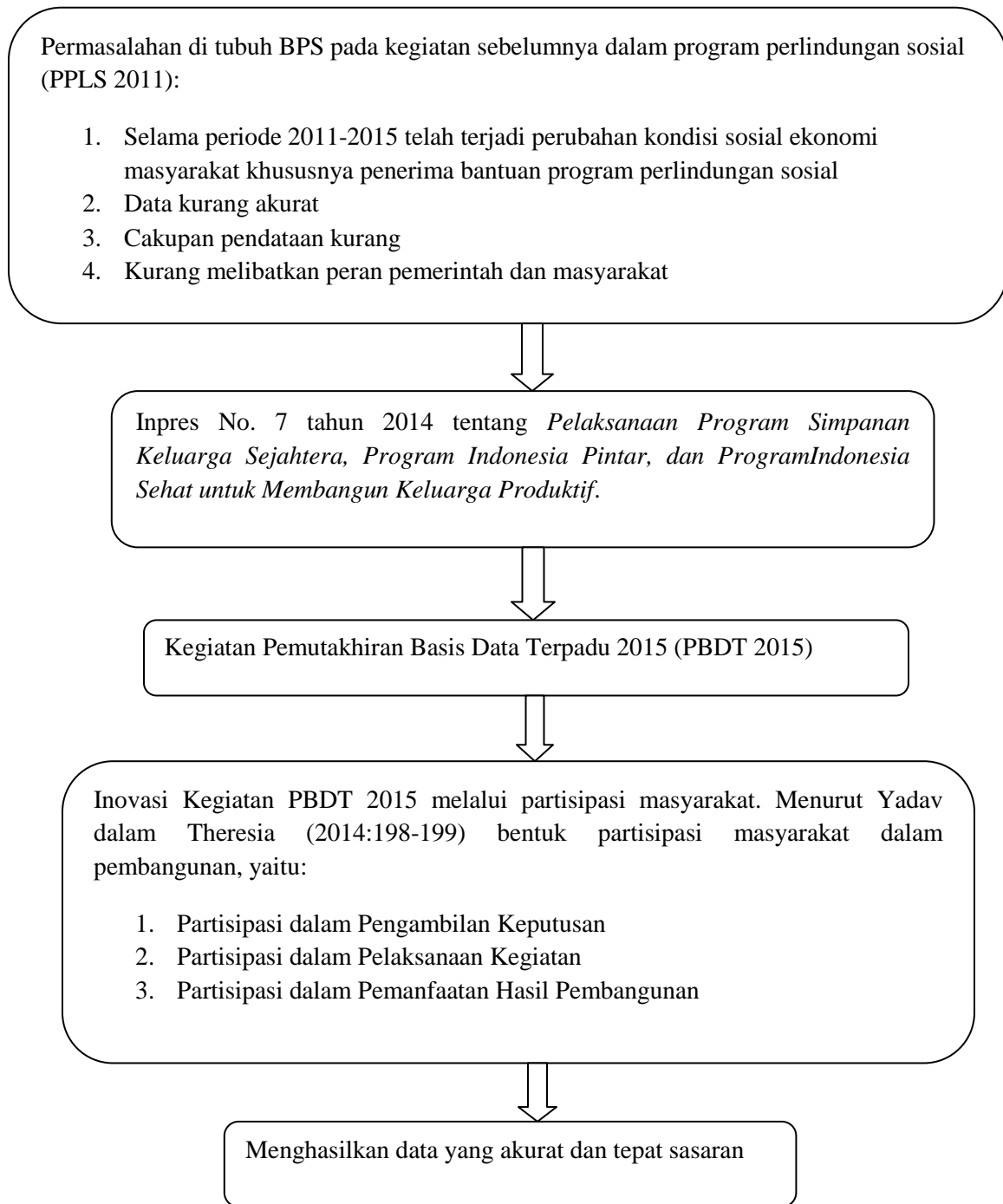
Kemiskinan merupakan fenomena yang selalu menjadi isu sentral dan perhatian di Indonesia. Semakin meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia, di perlukan cara untuk pengentasan kemiskinan, yang salah satunya melalui sistem perlindungan sosial. Sistem perlindungan sosial ini diarahkan untuk membantu mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. Perkembangan sistem perlindungan sosial terus berkembang, saat ini perlindungan sosial dilaksanakan melalui program-program yang sudah dibuat oleh pemerintah. Berdasarkan Inpres No. 7 tahun 2014 tentang *Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif*. Dalam penetapan sasaran program yang telah dibuat, diperlukan basis data terpadu yang menjadi rujukan siapa yang berhak untuk mendapatkan bantuan pada program tersebut. Untuk itu, dilakukan kegiatan PBDT 2015 dengan tujuan adalah untuk memperoleh keterangan rumah tangga dan anggota rumah tangga BDT kondisi tahun 2015 sebagai data dan informasi mutakhir. Karena pada kegiatan sebelumnya yaitu PPLS 2011, akurasi data yang dihasilkan tidak akurat serta pencakupan pendataan

kurang. Dengan tersedianya data tersebut kementerian/lembaga dan pemerintah daerah maupun swasta dapat menggunakannya untuk penetapan sasaran program.

Seiring dengan kegiatan PBDT 2015 ini, BPS selaku badan yang ditugaskan oleh pemerintah dalam hal ini berinovasi dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam kegiatan PBDT 2015 ini. Inovasi ini bertujuan agar BPS dapat semakin meningkatkan kinerja, menyajikan data yang berkualitas, dan tepat sasaran. Dengan demikian dapat dilihat inovasi yang dilakukan BPS dengan melibatkan partisipasi masyarakat pada kegiatan PBDT 2015 dan sejauh mana partisipasi masyarakat ikut serta dalam kegiatan ini sebagai wujud dalam proses pembangunan. Bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat dalam tahap pembangunan ada beberapa bentuk. Menurut Yadav dalam Theresia (2014:198-199) bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu:

1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan
2. Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan
3. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Deskripsi di atas dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

Sumber: diolah oleh peneliti

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut Sugiyono (2011:9) adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-

angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan tipe deskriptif.

Tipe deskriptif menurut Sugiyono (2011:11) adalah tipe yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antar variabel satu dengan variabel yang lain. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif untuk memaparkan dan menganalisis data yang

didapatkan, sehingga mendapatkan gambaran secara luas dan penjelasan mengenai inovasi kegiatan PBDT 2015 melalui partisipasi masyarakat dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di BPS Kota Bandar Lampung secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat fenomena yang ada.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pedoman untuk membatasi peneliti dalam memilih data apa saja yang relevan serta untuk dapat menyelesaikan masalah yang diajukan dalam penelitian ini secara tepat, maka diperlukan upaya-upaya pembatasan dan pemfokusan terhadap data-data yang ada di lapangan. Menurut Moleong (2013:97) fokus peneliti dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi peneliti untuk memilih data yang relevan dan data yang tidak relevan.

Berdasarkan hal tersebut, pada penelitian ini peneliti memfokuskan masalah penelitian pada:

1. Inovasi yang dilakukan BPS Kota Bandar Lampung dalam wujud partisipasi masyarakat pada kegiatan PBDT 2015 dengan melihat keterlibatan, kesukarelaan dan lingkup kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk menciptakan data yang lebih akurat dan tepat sasaran guna penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan .
2. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PBDT 2015 dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut Yadav dalam Theresia (2014:198-199), yaitu:

1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan atau dalam perencanaan kegiatan PBDT 2015

2. Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan

Sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PBDT 2015

3. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan dari kegiatan PBDT 2015

3. Faktor faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PBDT 2015 dengan melihat faktor internal yaitu umur, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan, domisili masyarakat serta pengetahuan masyarakat dan faktor eksternal yaitu melihat peran masing-masing *stakeholder* yang terlibat dalam berjalannya kegiatan PBDT 2015.

C. Lokasi Penelitian

Menurut Moleong (2011:86), lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama sekali dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi, dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Lokasi dalam penelitian ini yaitu BPS Kota Bandar Lampung.

Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena BPS Kota Bandar Lampung merupakan suatu percontohan dalam kegiatan PBDT 2015 yang melibatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, BPS Kota dipilih karena masyarakat kota sendiri lebih dominan dalam partisipasi yang lebih aktif. Lokasi penelitian berada di Jalan Sutan Sahrir No. 30 Pahoman Bandar Lampung.

D. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Tika (2006:58), pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode atau teknik pengumpulan data dengan masalah, tujuan dan hipotesis penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara secara terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara (*interview guide*). Informan pada penelitian ini adalah pimpinan BPS Kota Bandar Lampung dan beberapa pegawai di BPS Kota Bandar Lampung serta masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan PBDT 2015 ini.

Tabel 2. Informan Wawancara

No	Informan	Substansi/Jabatan	Tanggal Wawancara
1.	Bapak Wildan M. Akrabi	Kasi Statistik Nasional BPS Kota Bandar Lampung	01 Maret 2016
2.	Bapak Sobirin	Kordinator Statistik Kecamatan (KSK) Panjang	18 February 2016 dan 29 February 2016
3.	Ibu Sriyatun	Subag TU BPS Kota Bandar Lampung	18 February 2016
4.	Ibu Juherti	Ketua RT 02 Lk 1 Gunung Sulah	15 Maret 2016
5.	Ibu Sariyati	Masyarakat sebagai Petugas lapangan PBDT 2015	14 Maret 2016
6.	Zainab	Masyarakat sebagai Petugas Pengolahan Data PBDT 2015	20 Maret 2016
7.	Unang	Masyarakat sebagai Petugas Pengolahan Data PBDT 2015	20 Maret 2016
8.	Ibu Rahmawati	Masyarakat	02 Mei 2016

Sumber: diolah oleh peneliti

2. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek. Pada penelitian ini pengamatan yang dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa sehingga *observer* berada pada objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, observasi yang telah dilakukan oleh peneliti adalah mengamati bagaimana berjalannya kegiatan PBDT 2015 dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat yang dilakukan

oleh BPS Kota Bandar Lampung, serta mengamati hasil dari kegiatan PBDT yang telah diterima oleh masyarakat.

3. Dokumentasi

Data sekunder (dokumentasi) adalah data yang diperoleh dari kantor, buku (kepuustakaan), atau pihak-pihak lain yang memberikan data yang erat kaitannya dengan objek dan tujuan penelitian. Data ini biasanya sudah diolah atau ditabulasikan oleh kantor dan pihak yang bersangkutan. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa buku PBDT 2015, buku pedoman pencacah PBDT 2015, skripsi, surat kabar yang sesuai dengan bahasan penelitian serta foto yang diambil oleh peneliti saat observasi dilapangan.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Tresiana (2013:119-120) yang terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut adalah :

a. Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data yaitu seluruh kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Kegiatan yang telah dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini adalah melakukan riset. Dalam kegiatan riset ini, peneliti mencari data-data yang terkait dengan kegiatan inovasi PBDT 2015 melalui masyarakat ke instansi pemerintah yakni BPS Kota Bandar Lampung serta masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam

kegiatan ini. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data dari media cetak maupun elektronik yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan PBDT 2015 di BPS Kota Bandar Lampung.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah kegiatan proses pemilihan, pemilahan, *focusing* dan penyederhanaan data mentah yang ada dalam semua bentuk catatan dan dokumen lapangan. Kegiatan mereduksi data yang telah dilakukan dalam penelitian ini meliputi : perekapan hasil wawancara, pengamatan dan dokumentasi baik yang berhasil direkam melalui recorder maupun catatan-catatan lapangan dan hasil pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian. Pada penelitian ini, data yang diperoleh kemudian dipilih dan diseleksi, serta difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan langkah BPS Kota Bandar Lampung dalam inovasi kegiatan PBDT 2015 melalui partisipasi masyarakat.

c. Tampilan Data (*Data Display*)

Tampilan data yaitu kegiatan penyajian data atau informasi dalam bentuk yang terorganisasi dengan baik sehingga kegiatan pembuatan kesimpulan dalam bentuk narasi atas kategori dan pola tertentu menurut pandangan informan dapat dilakukan. Pada penelitian ini, data ditampilkan dalam bentuk uraian, tabel, gambar atau foto. Tetapi, yang paling banyak digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian ini adalah dengan teks naratif.

d. Membuat Kesimpulan

Membuat kesimpulan yaitu kegiatan pembuatan kesimpulan dalam bentuk narasi atas kategori dan pola tertentu menurut pandangan informan. Pada penelitian ini, data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dicari pola, tema serta hal-hal yang sering muncul, yang dituangkan dalam kesimpulan. Proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara mendiskusikan data hasil penemuan di lapangan dengan teori-teori yang diusulkan dalam Bab Tinjauan Pustaka, serta dengan pengambilan intisari dari rangkaian hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara, serta dokumentasi.

F. Teknik Keabsahan Data

Menurut Moleong (2011:324) untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).

1. Teknik memeriksa Derajat Kepercayaan (*credibility*)

Dalam penelitian ini, kriteria keabsahan data yang digunakan adalah kriteria derajat kepercayaan, penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dan nonkualitatif. Kriteria ini berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan

mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Adapun untuk memeriksa derajat kepercayaan ini menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Denzin yang dikutip dalam Moleong (2011:330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

Untuk menguji kredibilitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

2. Teknik memeriksa Keteralihan Data (*transferability*)

Teknik ini dilakukan dengan menggunakan “uraian rinci”, yaitu dengan melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Derajat keteralihan dapat dicapai lewat uraian yang cermat, rinci, tebal, atau mendalam serta adanya kesamaan konteks antara pengirim dan penerima. Upaya untuk memenuhi hal tersebut, peneliti melakukannya melalui tabulasi data serta disajikan oleh peneliti dalam hasil dan pembahasan.

3. Teknik Memeriksa Kebergantungan (*dependability*)

Dalam penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan penelitian di lapangan tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji *dependability*-nya, dan untuk mengecek apakah hasil penelitian ini benar atau tidak, maka peneliti mendiskusikannya dengan pembimbing. Hasil yang dikonsultasikan antara lain proses penelitian dan taraf kebenaran data serta penafsirannya.

4. Kepastian Data (*confirmability*)

Kepastian data berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pembimbing menyangkut kepastian asal-usul data, logika penarikan kesimpulan dari data dan penilaian derajat ketelitian serta telaah terhadap kegiatan peneliti tentang keabsahan data.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik. Materi yang merupakan muatan baru dalam UU Nomor 16 Tahun 1997, antara lain :

1. Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri atas statistik dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah secara mandiri atau bersama dengan BPS, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan BPS.

2. Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam Berita Resmi Statistik (BRS) secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan.
3. Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.
4. Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS.

Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas, peranan yang harus dijalankan oleh BPS adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau *survey* yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder
2. Membantu kegiatan statistik di departemen, lembaga pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional.
3. Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik.
4. Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia.

Instansi vertikal BPS terdiri dari BPS provinsi dan BPS kabupaten/kota. BPS Provinsi adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala BPS. BPS kabupaten/kota adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi.

B. Visi, Misi dan Nilai-Nilai BPS Kota Bandar Lampung

BPS Kota Bandar Lampung memiliki visi yaitu : **“Pelopor data statistik terpercaya untuk semua”**.

Sesuai dengan visinya, BPS Kota Bandar Lampung telah merumuskan misinya sebagai berikut:

1. Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien.
2. Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia.
3. Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak.
5. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien.

BPS Kota Bandar Lampung memiliki nilai-nilai inti (*core values*) yang merupakan pondasi yang kokoh untuk membangun jati diri dan penuntun perilaku setiap insan BPS dalam melaksanakan tugas yaitu:

1. Profesional

a. Kompeten

Mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban

b. Efektif

Memberikan hasil maksimal

c. Efisien

Mengerjakan setiap tugas secara produktif, dengan sumber daya minimal

d. Inovatif

Selalu melakukan perbaruan dan/atau penyempurnaan melalui proses pembelajaran diri secara terus menerus

e. Sistemik

Meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses perkerjaan yang satu menjadi bagian tidak terpisahkan dari pekerjaan yang lain

2. Integritas

a. Dedikasi

Memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban dan institusi

b. Disiplin

Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

c. Konsisten

Satunya kata dengan perbuatan

d. Terbuka

Menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari berbagai pihak

e. Akuntabel

Bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur

3. Amanah

a. Terpercaya

Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, yang tidak hanya didasarkan pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh dimensi mental spiritual

b. Jujur

Melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang dari prinsip moralitas

c. Tulus

Melaksanakan tugas tanpa pamrih, menghindari konflik kepentingan (pribadi, kelompok, dan golongan), serta mendedikasikan semua tugas untuk perlindungan kehidupan manusia, sebagai amal ibadah atau perbuatan untuk Tuhan Yang Maha Esa

d. Adil

Menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya

C. Tugas, Fungsi dan Kewenangan BPS Kota Bandar Lampung

Tugas, fungsi dan kewenangan BPS telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

Adapun tugas, fungsi, dan kewenangan BPS Kota Bandar Lampung yaitu sebagai berikut :

1. Tugas

Melaksanakan tugas pemerintahan dibidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

- a. Pengkajian, penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang statistik;
- b. Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional;
- c. Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar;
- d. Penetapan sistem statistik nasional;
- e. Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang kegiatan statistik; dan
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.

3. Kewenangan

- a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. Penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional;
- e. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - i. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatan statistik;
 - ii. Penyusun pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral.

D.Struktur Organisasi BPS Kota Bandar Lampung

Deskripsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik. Susunan organisasi BPS terdiri dari:

1. Kepala;
2. Sekretariat Utama;
3. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik;
4. Deputi Bidang Statistik Sosial;

5. Deputi Bidang Statistik Produksi;
6. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa;
7. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik;
8. Inspektorat Utama;
9. Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
10. Instansi Vertikal

BPS dipimpin oleh seorang kepala yang mempunyai tugas memimpin BPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BPS; menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BPS yang menjadi tanggung jawabnya; serta membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain. Kepala dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, 5 (lima) Deputi dan Inspektorat Utama.

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian administrasi, dan sumber daya di lingkungan BPS. Sekretariat Utama terdiri dari beberapa Biro, setiap Biro terdiri dari beberapa Bagian dan setiap Bagian terdiri dari beberapa Subbagian. Sekretariat Utama terdiri dari Biro Bina Program, Biro Keuangan, Biro Kepegawaian, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum, dan Biro Umum.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang metodologi dan informasi statistik. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik terdiri dari Direktorat

Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei, Direktorat Diseminasi Statistik, dan Direktorat Sistem Informasi Statistik.

Deputi Bidang Statistik Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik sosial. Deputi Bidang Statistik Sosial terdiri dari Direktorat Statistik Kependudukan & Ketenagakerjaan, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, dan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial.

Deputi Bidang Statistik Produksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik produksi. Deputi Bidang Statistik Produksi terdiri dari Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan, Direktorat Peternakan, Perikanan & Kehutanan dan Direktorat Statistik Industri.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik distribusi dan jasa. Deputi Bidang Statistik Distribusi & Jasa terdiri dari Direktorat Statistik Harga, Direktorat Statistik Distribusi, dan Direktorat Statistik Keuangan, TI & Pariwisata.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang neraca dan analisis statistik. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik terdiri dari Direktorat Neraca Produksi, Direktorat Neraca Pengeluaran, dan Direktorat Analisis & Pengembangan Statistik.

Inspektorat Utama yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BPS;

Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan serta teknis dan fungsional.

Instansi vertikal BPS terdiri dari BPS provinsi dan BPS kabupaten/kota. BPS provinsi adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi Lampung.

BPS Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi.

Disamping itu terdapat Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) yang pembentukannya berlandaskan pada Keputusan Presiden Nomor 163 tahun 1998 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Statistik sebagai perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Badan Pusat Statistik yang berkedudukan di Jakarta. Struktur organisasi Sekolah Tinggi Ilmu Statistik didasarkan pada Keputusan Kepala BPS Nomor 101 tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Sekolah Tinggi Ilmu Statistik dipimpin oleh seorang ketua.

E. Pengolahan Data BPS Kota Bandar Lampung

Tahap pengolahan data sangat menentukan seberapa jauh tingkat keakuratan dan ketepatan data statistik yang dihasilkan. BPS merupakan instansi perintis dalam penggunaan komputer karena telah memulai menggunakannya sejak sekitar 1960. Sebelum menggunakan komputer, BPS menggunakan kalkulator dan alat hitung sipoa dalam mengolah data.

Teknologi komputer yang diterapkan di BPS selalu disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan juga mengacu kepada kebutuhan. Personal komputer yang secara umum lebih murah dan efisien telah dicoba digunakan untuk menggantikan mainframe. Sejak 1980-an, personal komputer telah digunakan di seluruh kantor BPS provinsi, diikuti dengan penggunaan komputer di seluruh BPS kabupaten dan kota sejak 1992.

Dengan menggunakan personal komputer, kantor statistik di daerah dapat segera memproses pengolahan data, yang merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari pengumpulan data, kemudian memasukkan data mentah ke dalam komputer dan selanjutnya data tersebut dikirim ke BPS pusat untuk diolah menjadi data nasional.

Pengolahan data menggunakan personal komputer telah lama menjadi contoh pengolahan yang diterapkan oleh direktorat teknis di BPS pusat, terutama jika direktorat tersebut harus mempublikasikan hasil yang diperoleh dari survei yang diselenggarakan.

Pengolahan data Sensus Penduduk tahun 2000 telah menggunakan mesin *scanner*, tujuannya untuk mempercepat kegiatan pengolahan data. Efek positif dari penggunaan komputer oleh direktorat teknis yaitu selain lebih cepat, juga dapat memotivasi pegawai yang terlibat turut bertanggung jawab untuk menghasilkan sebanyak mungkin data statistik dan indikator secara tepat waktu dan akurat dibanding sebelumnya. Selain itu, penggunaan komputer sangat mendukung BPS dalam menghasilkan berbagai data statistik dan indikator-indikator yang rumit seperti

kemiskinan, *Input-Output (I-O) table*, *Social Accounting Matrix (SAM)*, dan berbagai macam indeks komposit dalam waktu yang relatif singkat.

Pada 1993, BPS mulai mengembangkan sebuah sistem informasi statistik secara geografis khususnya untuk pengolahan data wilayah sampai unit administrasi yang terkecil yang telah mulai dibuat secara manual sejak 1970. Data wilayah ini dibuat khususnya untuk menyajikan karakteristik daerah yang menonjol yang diperlukan oleh para perumus kebijakan dalam perencanaan pembangunan.

Dalam mengolah data, BPS juga telah mengembangkan berbagai program aplikasi untuk data *entry*, *editing*, validasi, tabulasi dan analisis dengan menggunakan berbagai macam bahasa dan paket komputer. BPS bertanggung jawab untuk mengembangkan berbagai perangkat lunak komputer serta mentransfer pengetahuan dan keahliannya kepada staf BPS daerah.

Pembangunan infrastruktur teknologi informasi di BPS didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai yaitu mengikuti perkembangan permintaan dan kebutuhan dalam pengolahan data statistik; melakukan pembaharuan/inovasi dalam hal metode kerja yang lebih baik serta memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi statistik.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Inovasi Kegiatan PBDT 2015 Melalui Partisipasi Masyarakat

Inovasi BPS dilakukan melalui partisipasi masyarakat telah memberikan dampak yang lebih baik dalam pembangunan, dengan akurasi data yang tepat dan tidak ada lagi pendataan yang salah sasaran sehingga masyarakat yang tidak mampu dapat menikmati hasil dari pembangunan.

2. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan PBDT 2015

a. Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan

Masyarakat dilibatkan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) yang diselenggarakan di setiap kelurahan. Kesukarelaan masyarakat dalam partisipasi ini adalah terinduksi, dimana masyarakat diajak oleh pihak lain. FKP berjalan dengan lancar dengan diberi kebebasan dalam bersuara, kendala dalam tahap ini adalah jumlah masyarakat yang hadir dari setiap perwakilan RT berbeda, sehingga informasi yang didapat belum maksimal.

b. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kegiatan

Masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan sebagai petugas lapangan dan pengolahan data, melalui seleksi dan pelatihan. Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar dengan kesukarelaan partisipasi masyarakat secara spontan. Kendala dalam pelaksanaan ini masih ditemukannya penulisan data yang tidak jelas dan salah sehingga membuat bingung pada proses pengolahan data.

a. Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Pada tahap ini, keterlibatan masyarakat terlihat pada saat memanfaatkan hasil pembangunan melalui program yang telah direalisasikan oleh pemerintah terkait program perlindungan sosial melalui Kartu Indonesia Sehat(KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Masyarakat telah dapat memanfaatkan kartu-kartu tersebut dengan baik sesuai kebutuhan.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Faktor internal terdiri dari faktor pendidikan yang memberikan pengaruh terhadap kehadiran dan keaktifan dalam kegiatan, faktor usia mempengaruhi bentuk sumbangan yang diberikan dan faktor pekerjaan mempengaruhi partisipasi dalam pertemuan dan pengerjaan saat kegiatan. Sedangkan faktor eksternal meliputi fasilitas dan peralatan yang disediakan oleh pihak BPS Kota Bandar Lampung dan kepemimpinan pemerintah setempat dalam memberikan informasi terhadap warganya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti akan memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Inovasi harus lebih ditingkatkan melalui aplikasi program komputer yang ada sehingga dalam pengolahan data dapat lebih efektif.
2. Pihak BPS harus lebih menguatkan partisipasi masyarakat kepada masyarakat yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan menetapkan jumlah masyarakat dari setiap RT yang hadir dalam kegiatan FKP.
3. Pihak BPS harus lebih selektif dalam menyeleksi petugas pada tahap tes tertulis, dengan dapat mendeteksi hasil tes tertulis lewat komputer. Sehingga dalam pendataan di lapangan ditulis dengan benar dan jelas.
4. Masyarakat yang bertugas harus lebih menyiapkan diri saat turun lapangan agar dapat mendapatkan informasi yang benar-benar mutakhir dari narasumber dengan cara bersikap baik, ramah dan sopan.
5. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak BPS harusnya lebih merata ke setiap daerah pencacahan dengan cara melakukan pengawasan secara berkala, tidak hanya di satu tempat dan satu waktu saja. Sehingga jika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh petugas dapat diatasi dengan cepat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Budiardjo, Miriam. 2004. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama
- Conyers, Diana. 1991. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta. UGM Press
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis dan Empirik*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Dwiyanto, Agus dkk. 2012. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press
- Ellitan, Lena dan Lina Anatan. 2009. *Manajemen Inovasi (Transformasi Menuju Organisasi Kelas Dunia)*. Bandung. Alfabeta
- Huraerah, Abu. 2011. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat. Model , Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung. Humaniora
- Kaho, Josef Riwu. 2010. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta. Rajawali Pers
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Persepektif Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta
- Moloeng, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya
- Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta. PT Rineka Cipta
- Rukminto, Isbandi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok. Fisip UI Pers

Sinambela, Lijan P. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta. Bumi Aksara

Setiadi, Nugroho J. 2003. *Perilaku Konsumen*. Jakarta. Kencana

Slamet. 2003. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta. Sebelas Maret University Press

Supriatna, Tjahya. 2000. *Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung. Humaniora Utama Press

Sugioyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta

Sunarti. 2003. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan secara Kelompok*. Jurnal Tata Loka. Semarang. Planologi UNDIP

Suryawati, C. 2005. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. JMPK Vol. 08/No.03/September/2005

Syahyuti. 2006. *30 Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian*. Jakarta. Bina Rena Pariwara

Theresia, Aprillia dkk. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung. Alfabeta

Tika, Moh. Pabundu. 2006. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta. PT Bumi Aksara

Tresiana, Novita. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Lampung. Lembaga Penelitian Universitas Lampung

Zauhar, Soesilo. 2012. *Reformasi Administrasi*. Jakarta. PT Bumi Aksara

Sumber lain:

Badan Pusat Statistik. *Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015*. Jakarta. 2015.

Badan Pusat Statistik. *Reformasi Birokrasi Badan Pusat Statistik*. Jakarta. 2014

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2014. Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah ke Depan. Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Jakarta

Undang-Undang Dasar 1945

Sumber Internet:

bandarlampungkota.bps.go.id diakses pada 11 September 2015

[www.rri.co.id/post/berita/107622/daerah/tingkatkan akurasi data bps libatkan peran serta masyarakat.html](http://www.rri.co.id/post/berita/107622/daerah/tingkatkan_akurasi_data_bps_libatkan_pera_n_serta_masyarakat.html) diakses pada 1 September 2015

www.harianlampung.com/m/index.php?ctn=1&k=kawasam&i=8489 diakses pada 1 September 2015